

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam studi hubungan internasional diplomasi adalah salah satu hal yang sangat berkaitan. Dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara, diplomasi merupakan instrumen penting dalam pelaksanaannya. Guna mengejar tujuan dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum, konsep diplomasi lebih merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor menurut G.R Berridge (Nurika, 2017). Definisi lain mengatakan bahwa pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat merupakan penerapan kepandaian dan taktik dari diplomasi menurut Sir Ernest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice*. Adapun fungsi dari diplomasi sendiri adalah menjamin kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses, menyelesaikan perbedaan-perbedaan. (Prayuda & Sundari).

Seiring perkembangan zaman, diplomasi dilakukan dengan berbagai cara lainnya guna menyesuaikan perkembangan dunia, diplomasi publik kerap dilakukan karena konsepnya yang lebih lunak, dengan tujuan mempengaruhi perilaku, dan pandangan publik terhadap suatu negara. Diplomasi publik merupakan suatu aktivitas pemerintah guna menjalin komunikasi publik. Selain itu, dengan tujuan memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan yang diambil oleh negaranya merupakan proses pemerintah terhadap publik mancanegara, ini adalah makna lain dari diplomasi publik (Hennida, Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri, 2008).

Korea Selatan adalah salah satu negara yang juga berhasil melaksanakan diplomasi publiknya. Indonesia sebagai negara sahabat, juga telah terpengaruh budaya Korea Selatan, hal ini terbukti dengan adanya fenomena *Korean Wave*. Fenomena ini diterima baik oleh berbagai kalangan yang juga menjadli salah satu fokus perpolitikan Korea Selatan (Sendow, Mamentu, & Rengkung). *Korean Wave* memang di sediakan untuk konsumsi publik negara-negara lain, *soft power* menjadi sebuah instrument dari adanya fenomena *korean wave* (Suryani, 2014).

Disamping *Korean Wave*, dunia pendidikan di Korea Selatan juga menjadi alat diplomasi publik Korea Selatan. Sistem pendidikan Korea Selatan dianggap memiliki sistem terbaik. Menurut I-Gen, tingkat literasi siswa di Korea Selatan mencapai 100%, juga dalam tes analisa berpikir kritis (I-Gen). Disiplinnya pendidikan Korea Selatan membuat keberhasilannya sangat tinggi. Dilansir dari laman Edsys, Korea Selatan menempati posisi ketiga dari dua puluh *The Country with Top Education System* (Edsys, 2019). Atas keberhasilan dan kemajuan tersebut, pemerintah Korea Selata terus berusaha dan berupaya guna mengubah pandangan dunia terhadap Korea Selatan dari negara penerima bantuan hingga menjadi negara pemberi bantuan, untuk lebih memfokuskan dan mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut, pemerintah Korea Selatan membentuk sebuah lembaga khusus yang berfokus dalam hal tersebut.

Korea International Cooperation Agency (KOICA) merupakan sebuah lembaga yang mengelola bantuan-bantuan kepada negara-negara berkembang, melalui dana maupun program kerjasama teknis yang di jalin dengan berbagai negara salah satunya adalah Indonesia. KOICA merupakan lembaga dibawah naungan pemerintah Korea Selatan melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Republik Korea. KOICA bergerak di berbagai bidang, pendidikan juga menjadi sala satu fokus KOICA dalam melakukan berbagai program dukungannya.

Mengenai berbagai macam bentuk program KOICA, beasiswa merupakan salah satu program KOICA dalam bidang pendidikan. KOICA membuka program beasiswa untuk masyarakat kewarganegaraan Indonesia di berbagai bidang keilmuan. Beasiswa KOICA menawarkan berbagai jurusan yang beragam di berbagai universitas terbaik di Korea Selatan. Beberapa bidang ahli yang akan didapatkan dalam program beasiswa tersebut seperti Pendidikan, Kesehatan, Tata kelola Pemerintah, Pertanian, Pengembangan Kawasan Urban, Transportasi, Sains, Teknologi, Lingkungan, Iklim, Air, hingga Gender Equality (ATDIKBUD, 2021). Banyaknya program yang terjalin juga menjadi pererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, pada tahun 2022 KOICA juga menawarkan banyak sekali program beasiswa yang dapat diambil, salah satunya adalah program *Master's Degree Program in Control of Infectious Disease* yang dimulai pada tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2024 di Universitas Yonsei. Program lainnya ada *Master's Degree Program in High Value-added Agriculture (ASIA)* dengan durasi tujuh belas bulan di Universitas Kyungpook National University (CIAT KOICA).

Bersama dengan itu, KOICA tidak hanya memberikan penawaran beasiswa dibidang pendidikan, sumber daya manusia juga termasuk dalam penanganan khusus dalam pelaksanaan program-program kerjasama KOICA. Pada tahun 2018 KOICA melakukan program kerjasama bantuan sumber daya manusia dan pengembangan fisik dibidang TIK melalui program *Record of Discussion IT Management Support for ICT Training and Development Center* di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) pada tahun 2018 hingga 2021. Program bantuan ini adalah tindak lanjut dari bantuan sebelumnya dengan program *ICT Capacity Building for Central and Local Government in Indonesia* yang menjadi

salah satu komitmen KOICA dalam mendukung peningkatan SDM pemerintah di Indonesia melalui bidang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas tentang mengapa Korea Selatan menggunakan KOICA sebagai alat Diplomasi Pendidikan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut

“Apa kepentingan nasional yang ingin dicapai Korea Selatan melalui KOICA di Indonesia?”

C. Kerangka Teori

1. Kepentingan Nasional

Setiap negara dengan secara pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam hubungan internasional kepentingan nasional merupakan konsep utama. Kepentingan nasional merupakan tujuan utama dari sebuah negara atau ambisi sebuah negara dari segala sektor yang dimilikinya, dimana kepentingan nasional merupakan konsep dasar dari hubungan internasional. Sebagai tujuan maupun instrumen, kepentingan nasional berkaitan dengan *power* negara khususnya yang bersifat *hard power* (Bainus & Rachman, 2018).

Secara normatif, kepentingan nasional merupakan kumpulan tujuan, cita-cita, suatu bangsa yang ingin dicapai melalui hubungan dengan negara mitra. Melihat perspektif dari Daniel S. Paap berkata bahwa didalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek yang mencakup kepentingan nasional berupa ekonomi, ideologi, kekuatan, keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dapat disimpulkan

dari pengertian kepentingan nasional diatas bahwa target, tujuan, cita-cita yang memiliki multi dimensi baik politik, ekonomi, sosial hingga pertahanan keamanan disebut dengan kepentingan nasional. Beralih pada pengertian kepentingan nasional menurut H.J Morgenthau, kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari ancaman atau gangguan negara lain yang disebutkan sebagai negara yang yang berkonflik. Sedangkan menurut Paul Seabury menjabarkan kepentingan nasional menjadi dua sisi sudut pandang secara deskriptif dan normatif. Dari sisi deskriptif adalah kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh suatu negara melalui pemerintah, sementara itu melalui pengertian secara normati adalah tujuan atau kepentingan nasional tersebut harus dicapai melalui hubungan dengan negara lainnya. (Sudarsono, Mahroza, & D.W, 2018)

Menurut (Seran, Damayanti, & Haqqi) perspektif lain mengenai kepentingan nasional, K.J Holsti berpandangan bahwasannya kepentingan nasional memiliki empat unsur didalamnya yaitu:

a) ***Security*** (keamanan)

Keamanan merupakan unsur penting dan utama setiap negara sebagai *self defense*. Dimana setiap negara membutuhkan perlindungan untuk menjaga penduduk, wilayah, kebudayaan dan segala aspek didalamnya guna menjaga dari berbagai hal yang membahayakan yang tidak hanya dari segi fisik tetapi juga seperti ekonomi, pemerintahan serta ideologi negara.

b) ***Autonomy*** (Otonomi)

Kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain, kemampuan untuk menjalankan kebijakan domestik dan luar negeri berdasarkan prioritas pemerintah dan segala risikonya. Dengan adanya hasil eskalasi kekuatan nasional melalui kebijakan-kebijakan tertentu terutama disektor ekonomi dan militer.

c) *Welfare* (kesejahteraan)

Menjaga kedamaian dan kesejahteraan negara yang menjadi titik keberhasilan suatu negara. Dimana kesejahteraan juga menjadi hal atau impian setiap negara dalam menjalani kehidupan bernegara.

d) *Prestigious* (Prestis)

Prestis dimaksudkan kepentingan guna mendapatkan pengakuan, seperti status, pencapaian, keberhasilan. Pengakuan disebutkan sangat penting guna mendapatkan identitas baik agar berperan menjadi pihak yang dapat diakui.

Kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara dalam melindungi identitas fisik, politik, kultural sebuah negara, ini merupakan definisi kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations*. Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai perjuangan negara guna mencapai

kekuasaan dan mempertahankan negaranya dengan cara menunjukkan aksi-aksi politik. Disamping itu, identifikasi lain dari Holsti (1987) dalam *International Politic: A Framework Analysis* mengenai kepentingan nasional adalah dimana kepentingan nasional memiliki tiga klasifikasi, yang pertama adalah *core values*, dimana menyangkut sebuah kedaulatan negara, kedua adalah *middle-range objectives*, menyangkut sektor perekonomian perkembangan dan pertumbuhannya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah *long-range goals*, seperti yang disebutkan, kepentingan ini kepentingan berjangka panjang seperti hal-hal yang menyangkut mewujudkan perdamaian dunia (Rijal, 2018). Dari ketiga definisi diatas, pada dasarnya memiliki arti utama yang sama, dimana kepentingan nasional ini berdasarkan tujuan dan kebutuhan masing-masing negara guna melindungi negaranya, juga kepentingan nasional menjadi alasan dasar dari terciptanya kebijakan luar negeri.

Dalam menentukan pembuatan keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi dasar dan umum dari terbentuknya berbagai kebijakan luar negeri, sebagai tolak ukur dalam menetapkan dan merumuskan. Oleh karena itu, kepentingan nasional yang jelas sangat diperlukan, guna menciptakan kebijakan dan kepentingan internasional. Pada konsep kepentingan nasional ini pemerintah Korea Selatan menggunakan KOICA sebagai salah satu aksi politiknya guna memenuhi kepentingan nasionalnya. KOICA yang dibentuk khusus guna memperkuat citra mengenai Korea Selatan dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara berkembang, hingga berkomitmen melakukan pertukaran-pertukaran budaya dan turut berperan di kerjasama global

(Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia). KOICA yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, pembangunan masuk kedalam *long-range goals* guna mempengaruhi negara penerima bantuan bahwa Korea Selatan merupakan negara yang bertujuan dalam mewujudkan membangun negara maju, mandiri, adil dan demokratis serta damai dan bersatu terdapat pada strategi kemitraan Korea Selatan untuk republik Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005 hingga 2020 (The Government of the Republic of Korea).

2. Konsep Bantuan Luar Negeri

Pada konsep ini, dimana ada negara yang berperan sebagai negara pemberi bantuan dan negara penerima bantuan. Bantuan-bantuan ini memiliki berbagai ciri dan bentuk, dari dana, SDM, dengan berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, jasa, dan masih banyak lagi. Hubungan timbal balik yang di jalin saling memberikan manfaat dan keuntungan antara satu atau lebih pihak yang bersangkutan. Hasil- hasil dari bantuan-bantuan tersebut tentunya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak di capai antara kedua belah pihak atau lebih.

Hibah dengan tujuan utama memperbaiki kondisi manusia, bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer sukarela dari negara atau publik ke negara lainnya atau ke organisasi internasional sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai. Bantuan-bantuan dengan berbagai bentuk seperti bantuan militer, ekspor-impor, perdagangan, pendanaan, uang tunai, kerjasama kesehatan, pembangunan, bantuan luar negeri merujuk pada konsep seperti ini (Achsini & Sisilia, 2020).

Melihat dari perspektif Therien bantuan luar negeri terbentuk dari perjuangan politik antara kekuatan Kanan dan Kiri. Kekuatan kiri yang didominasi oleh egalitarisme dan kesetaraan internasional sehingga berfokus pada isu moral. Bantuan luar negeri dari perspektif kekuatan kiri, bantuan luar negeri mewakili kepentingan negara pemberi bantuan. Sedangkan pada perspektif kekuatan kanan, memiliki definisi bantuan luar negeri yang lebih luas, dimana pada perspektif kanan, konsep bantuan luar negeri adalah *pure* bantuan dari negara donor atau negara pemberi bantuan. Menurut perspektif kanan, bantuan luar negeri akan menciptakan ketergantungan dan perlu meminimalisir kegiatan ini. Perbedaan yang signifikan antara kedua kekuatan kiri dan kanan adalah dimana kekuatan kanan menegaskan bantuan luar negeri diberikan dalam bentuk hibah dengan target orang miskin, sedangkan kanan lebih kepada pinjaman pembangunan infrastruktur seperti bandara, bendungan, maupun jalan (Azis, 2018). Pada konsep bantuan luar negeri, penelitian ini menjelaskan dimana KOICA sebagai lembaga pemerintahan Korea Selatan berperan sebagai negara donor atau pemberi bantuan dengan negara-negara penerima bantuan lainnya dengan fokus akan negara berkembang.

D. Hipotesis

Kepentingan nasional yang ingin dicapai Korea Selatan melalui KOICA di Indonesia adalah menciptakan citra positif dan eskalasi minat kunjungan belajar masyarakat Indonesia ke Korea Selatan melalui program bantuan luar negeri KOICA kepada BPPTIK tahun 2018 hingga 2021.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, menganalisis, mencatat, menerjemahkan kondisi-kondisi yang terkait dengan pembahasan ini. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*). *Library Resarch* yang digunakan adalah penelitian melalui literatur dan *online research* yang relevan atau bersangkutan dengan pembahasan ini. Data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, media *online*, *website* resmi, hingga platform sosial media.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini, diperlukan jangkauan penelitian mengenai Mengapa Korea Selatan menggunakan KOICA sebagai alat Diplomasi Pendidikan di Indonesia menggunakan konsep kepentingan luar negeri dan bantuan luar negeri pada program *Record of Discussion IT Management Support for ICT Training and Development Center* yang dijalin KOICA dengan BPPTIK pada tahun 2018 hingga 2021, maka penulis mengambil kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2021.

G. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi empat bab dengan **Bab I** berisi latar belakang mengapa permasalahan muncul, perumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Pada **Bab II** membahas mengenai KOICA. Selanjutnya di **Bab III** membahas mengenai bentuk diplomasi pendidikan Korea Selatan melalui KOICA di Indonesia. **Bab IV** Penutup,

merupakan Bab terakhir yang menyimpulkan isi materi penulisan penelitian ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi kritik dan saran untuk keberlanjutan penelitian ini.